



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Nomor: 192/UN9/DT.Kep/2012

Tentang

PERUBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA (S1)  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2008


REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,


- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor:1544/UN9.1.2/TU/2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal Mohon Penerbitan SK Perubahan Kurikulum
- Menimbang : a. bahwa kurikulum yang diterapkan pada satu jenjang pendidikan harus senantiasa sesuai dengan kompetensi keilmuan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat;  
b. bahwa Kurikulum Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008 berdasarkan SK Rektor Nomor: 448/H9/PE/2008 tanggal 28 Februari 2008 telah diterapkan selama 4 (empat) tahun belum pernah di evaluasi;  
c. bahwa syarat-syarat akademik yang ada pada Kurikulum 2008 terlalu berat dan berpotensi menjadi penghambat percepatan penyelesaian studi;  
d. bahwa beberapa mata kuliah yang ada pada Kurikulum 2008 sudah tidak relevan, tumpang tindih substansinya antara mata kuliah yang satu dengan lainnya;  
e. bahwa jumlah mata kuliah yang ada pada Kurikulum 2008 tidak seimbang dengan jumlah tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;  
f. bahwa untuk itu diperlukan perubahan Kurikulum Fakultas Hukum Tahun 2008 berdasarkan SK Rektor Nomor: 448/H9/PE/2008 tanggal 28 Februari 2008;  
g. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c, d, e dan f di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor sebagai dasar hukumnya.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Kepmendikbud RI Nomor: 0195/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Laksana Universitas Sriwijaya;
  4. Kepmendiknas RI Nomor: 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  5. Kepmendiknas Nomor: 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
  6. Kepmendiknas RI Nomor: 064/O/2003, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
  7. Kepmendikbud RI Nomor: 257/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA PERUBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA (S1) PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2008
- Pertama : Mencabut SK Rektor Nomor: 448/H9/PE/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2008.
- Kedua : Menghapus mata kuliah Bahasa Inggris 2, 3 dan 4 (non sks) dan mewajibkan kepada mahasiswa untuk menyerahkan sertifikat Institusional/Internasional TOEFL dengan skor minimal 450 atau sertifikat IELTS dengan skor rata-rata 5 pada saat akan mengikuti ujian sarjana.
- Ketiga : Menyempurnakan prasyarat pengambilan Program Kekhususan, Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), dan KKN/KKL.
- Keempat : Memasukkan Klinik Hukum sebagai mata kuliah wajib fakultas sejajar dengan mata kuliah KKN/KKL yang berbobot 4 sks.
- Kelima : Menghapuskan Program Kekhususan Hukum Islam dengan mengintegrasikannya ke dalam Program Kekhususan Hukum Perdata.
- Keenam : Menghapuskan mata kuliah yang tidak relevan, tumpang tindih substansi materinya dengan menggabungkannya pada mata kuliah yang memiliki kesamaan substansi.
- Ketujuh : Merubah struktur mata kuliah pilihan Program Kekhususan dari Pola Tertutup menjadi Pola Terbuka.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada Tanggal : 8 Agustus 2012

Rektor,  
  
Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A.  
NIP 195307071979032001



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dekan Fakultas Hukum Unsri

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya  
Nomor : 192/UN9/DT.Kep/2012  
Tanggal : 8 Agustus 2012

**PERUBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA (S1)  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2008**

**Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**A. Visi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Unggul terdepan dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di Bidang Hukum**

Penjabaran dari makna dalam visi adalah sebagai berikut :

- Unggul dan terdepan adalah suatu cita-cita untuk mencapai keadaan yang menunjukkan tingkat penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum yang ditunjukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga mampu berkompetisi di era globalisasi.
- Masyarakat Ilmiah dan professional adalah gambaran keadaan masyarakat, baik civitas akademika maupun pemangku kepentingan, untuk dapat mengerti, memahami, dan memiliki keterampilan di bidang hukum, dan pengetahuan hukum, sehingga mampu merealisasikan prinsip supremasi hukum yang berkeadilan di dalam semua dimensi dalam kehidupan bersama.
- Cerdas adalah pola dan cara berpikir ilmiah yang didasarkan pada landasan etika dan moralitas yang tinggi, serta cakap dalam menganalisis situasi dan kondisi peri-kehidupan hukum, guna menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan system hukum.
- Berbudaya adalah bersikap dan berperilaku hukum yang mencerminkan pengetahuan, kesadaran, kepatuhan, dan penghormatan terhadap hukum, sebagai tatanan struktur nilai dan norma yang mensejahterakan dan berkeadilan.

**B. Misi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi hukum yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan sarjana hukum yang cakap memahami, mengembangkan, dan menerapkan ilmu hukum dan cita hukum yang beretika dan bermoral. Menyelenggarakan, dan mengembangkan pendidikan tinggi hukum yang kompetitif, modern, dan maju, berbasis ilmu pengetahuan hukum dan teknologi (keterampilan) hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat.
2. Menanamkan, menumbuhkan, meningkatkan budaya hukum masyarakat yang dapat mewarnai dan member jiwa dan ruh bagi peri kehidupan hukum yang demokratis dan berkeadilan.
3. Menyelenggarakan, dan mengembangkan pendidikan tinggi hukum yang kompetitif, modern, dan maju untuk memberikan kontribusi pengetahuan hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bersama yang lebih sejahtera, tertib, dan berkeadilan masyarakat di bidang hukum dengan menerapkan ilmu hukum dan teknologi (keterampilan) hukum, sebagai upaya memberi sumbangsih untuk memajukan dan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

**C. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**C.1. Tujuan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

1. Menghasilkan lulusan berkualitas dan mandiri yang mampu menguasai ilmu-ilmu hukum dan terampil menerapkan hukum dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mampu bersaing di era globalisasi.
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi (keterampilan) hukum yang maju, baik secara teoritik-konseptual, metodologi, maupun paradigmatic, yang dapat memperkaya khasanah pengembangan ilmu hukum dalam semua dimensinya, dalam rangkaantisipasi perkembangan global.
3. Mewujudkan suatu tatanan kemasyarakatan yang berbudaya hukum yang memiliki nilai, sikap, etika, dan perilaku hukum yang demokratis dan berkeadilan sehingga tercipta masyarakat yang berkesadaran hukum dan patuh pada hukum.
4. Meningkatkan peran aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan cara menciptakan metode yang maju dalam sosialisasi dan penerangan hukum, konsultasi dan bantuan hukum, penyuluhan hukum, serta pembinaan layanan hukum.

## **C.2. Sasaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

1. Terwujudnya dan dihasilkannya lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan keterampilan di bidang hukum, baik aspek teoritik maupun praktik hukum.
2. Terwujudnya masyarakat akademik kreatif, kompeten, dan berdaya saing tinggi, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan teknologi (keterampilan) hukum, sebagai upaya mengantisipasi perkembangan global.
3. Terwujudnya sesuatu kehidupan kemasyarakatan yang berbasis pada budaya hukum yang tinggi.
4. Berkembangnya system interaktif dan jejaring dengan para pemangku kepentingan, baik dalam relasi sosial, pemerintahan yang kondusif maupun kewirausahaan.

## **C.3. Strategi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

1. Reorientasi, dimaksudkan untuk mengubah pola pikir, cara pandang, cara mengelola sumber daya dan cara bertindak, sikap dan perilaku serta tanggung jawab dari civitas akademika fakultas hukum universitas sriwijaya, agar lebih dapat meningkatkan layanan dan keahlian yang prima dalam semua aspek kewenangan yang ada, dalam rangka memanfaatkan potensi dan peluang yang ada, guna mendorong dan meningkatkan partisipasi segenap civitas akademika melalui peningkatan sinergitas antar kewenangan dalam mewujudkan koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplisiti yang berhasilguna dan berdayaguna.
2. Reposisi, dimaksudkan untuk meningkatkan dan menguatkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplisiti antar sebagai kebijakan dan program kelembagaan, guna mewujudkan pelaksanaan peran dan fungsi masing-masing komponen secara bijak dan bertanggung jawab, dengan cara merubah paradigma layanan menjadi penyumbang, pelaksana, dan penggagas yang aktif, serta dari paradigma yang mengatur kedalam (inward looking) menjadi keluar (outward looking).
3. Revitalisasi, dimaksudkan untuk membuat dan menguatkan kembali peta jalan (*road map*) menuju kemajuan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan, dengan cara membuat perencanaan yang menyeluruh dan strategis serta dilaksanakan secara bersama-sama (terpadu).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;
3. Kurikulum fakultas terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional;
4. Kurikulum inti adalah kurikulum yang berlaku secara nasional;
5. Kurikulum institusional adalah kurikulum yang dikembangkan oleh fakultas;
6. Beban studi adalah jumlah satuan kredit semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana hukum dengan jumlah kredit semester 150 sks;
7. Program Kekhususan adalah himpunan mata kuliah yang membentuk konsentrasi khusus;
8. Program Kekhususan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya adalah Program Kekhususan Hukum Pidana, Program Kekhususan Hukum Perdata, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara, dan Program Kekhususan Hukum Internasional;
9. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah tertentu yang dipilih mahasiswa sesuai dengan minat dan bakatnya;
10. Kode mata kuliah adalah simbol dari mata kuliah yang terdiri dari kode huruf dan angka.

BAB II  
KURIKULUM

Bagian Satu  
Kurikulum Inti  
Pasal 2

Kurikulum Inti meliputi :

1. Mata Kuliah Kurikulum Inti yakni Kurikulum yang berlaku secara nasional sebanyak 76 Sks Meliputi :
  - A. Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) terdiri dari :
    1. Pendidikan Agama : 2 sks
    2. Bahasa Indonesia : 2 sks
    3. Pendidikan Kewarganegaraan : 2 sks +

**Jumlah : 6 sks**
  - B. Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) terdiri dari :
    1. Pengantar Ilmu Hukum : 4 sks
    2. Pengantar Hukum Indonesia : 4 sks
    3. Ilmu Negara : 3 sks
    4. Hukum Perdata : 4 sks
    5. Hukum Pidana : 4 sks
    6. Hukum Tata Negara : 4 sks
    7. Hukum Administrasi Negara : 4 sks
    8. Hukum Internasional : 4 sks
    9. Hukum Dagang : 3 sks
    10. Hukum Adat : 2 sks
    11. Hukum Islam : 2 sks
    12. Hukum Agraria : 2 sks
    13. Hukum Acara Pidana : 3 sks
    14. Hukum Acara Perdata : 3 sks
    15. Hukum Acara Tata Usaha Negara : 2 sks
    16. Metode Penelitian Hukum : 2 sks
    17. Hukum Lingkungan : 2 sks +

**Jumlah : 52 sks**
  - C. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) 10 sks terdiri dari :
    - C.1. Litigasi terdiri dari :
      1. Praktik Peradilan Pidana : 2 sks
      2. Praktik Peradilan Perdata : 2 sks
      3. Praktik Peradilan Tata Usaha Negara : 2 sks
    - C.2. Non Litigasi Terdiri dari :
      1. Perancangan Perundang-undangan : 2 sks
      2. Perancangan Kontrak : 2 sks +

**Jumlah : 10 sks**
  - D. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) terdiri dari :
    1. Skripsi : 4 sks
    2. Filsafat Hukum : 2 sks +

**Jumlah : 6 sks**

- E. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB) terdiri dari :
- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Etika dan Tanggungjawab Profesi | : 2 sks +      |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>: 2 sks</b> |

**Total : A+B+C+D+E (6+52+10+6+2) = 76 sks**

Bagian Kedua  
KURIKULUM INSTITUSIONAL  
Pasal 3

Kurikulum Institusional meliputi :

- A. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) terdiri dari :
- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Bahasa Belanda | : 2 sks        |
| 2. Bahasa Inggris | : 2 sks +      |
| <b>Jumlah</b>     | <b>: 4 sks</b> |
- B. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) terdiri dari :
- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat                                       | : 2 sks         |
| 2. Hukum Ketenagakerjaan   | : 2 sks         |
| 3. Hukum Konstitusi  | : 2 sks         |
| 4. Hukum Perikatan   | : 2 sks         |
| 5. Hukum Pidana dalam Kodifikasi   | : 2 sks         |
| 6. Hukum Surat Berharga  | : 2 sks         |
| 7. Hukum Keluarga Dalam Islam  | : 2 sks         |
| 8. Hukum Tanah   | : 2 sks         |
| 9. Hukum Perdata Internasional   | : 2 sks         |
| 10. Hukum Pertambangan   | : 2 sks         |
| 11. Hukum Perkawinan   | : 2 sks         |
| 12. Hukum Pajak  | : 2 sks         |
| 13. Hukum Hak Asasi Manusia  | : 2 sks         |
| 14. Kuliah Kerja Nyata (KKN)/<br>Kuliah Kerja Lapangan (KKL)/ Klinik Hukum | : 4 sks         |
| 15. Sosiologi Hukum  | : 2 sks +       |
| <b>Jumlah</b>  | <b>: 32 sks</b> |
- C. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) terdiri dari :
- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Ilmu Ekonomi            | : 2 sks        |
| 2. Kriminologi             | : 2 sks        |
| 3. Ilmu Perundang-undangan | : 2 sks        |
| 4. Ilmu Politik            | : 2 sks +      |
| <b>Jumlah</b>              | <b>: 8 sks</b> |
- D. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) terdiri dari :
- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Program Kekhususan Hukum Pidana      |                 |
| 1. Perbandingan Hukum Pidana            | : 2 sks         |
| 2. Hukum Pidana di Luar KUHP            | : 2 sks         |
| 3. Politik Hukum Pidana                 | : 2 sks         |
| 4. Hukum Pidana Anak                    | : 2 sks         |
| 5. Hukum Penintensier                   | : 2 sks +       |
| <b>Jumlah</b>                           | <b>: 10 sks</b> |
| 2. Program Kekhususan Hukum Perdata     |                 |
| 1. Hukum Persetujuan Khusus             | : 2 sks         |
| 2. Hukum Perusahaan                     | : 2 sks         |
| 3. Hukum Penanaman Modal                | : 2 sks         |
| 4. Hukum Jaminan                        | : 2 sks         |
| 5. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)       | : 2 sks +       |
| <b>Jumlah</b>                           | <b>: 10 sks</b> |
| 3. Program Kekhususan Hukum Tata Negara |                 |
| 1. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi      | : 2 sks         |
| 2. Sistem Politik di Indonesia          | : 2 sks         |
| 3. Perbandingan Hukum Tata Negara       | : 2 sks         |
| 4. Hukum Kelembagaan Negara             | : 2 sks         |
| 5. Hukum Keuangan Negara                | : 2 sks +       |
| <b>Jumlah</b>                           | <b>: 10 sks</b> |

4. Program Kekhususan Hukum Internasional	
1. Hukum Laut Internasional	: 2 sks
2. Hukum Perjanjian Internasional	: 2 sks
3. Hukum Diplomatik dan Konsuler	: 2 sks
4. Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional	: 2 sks
5. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	: <u>2 sks</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>: 10 sks</b>

5. Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara	
1. Hukum Pemerintah Daerah	: 2 sks
2. Hukum Keuangan Negara	: 2 sks
3. Hukum Tata Ruang dan Perizinan	: 2 sks
4. Hukum Kepegawaian	: 2 sks
5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	: <u>2 sks</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>: 10 sks</b>

E. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) terdiri dari :	
1. Sosiologi	: 2 sks
2. Antropologi Budaya	: <u>2 sks</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>: 4 sks</b>

F. Mata Kuliah PILIHAN (MPPK) wajib <b>ditempuh 16 sks</b> yang dipilih di antara mata kuliah di bawah ini :	
1. Perbandingan Hukum Pidana	: 2 sks
2. Hukum Pidana di Luar KUHP	: 2 sks
3. Politik Hukum Pidana	: 2 sks
4. Hukum Pidana Anak	: 2 sks
5. Hukum Penintensier	: 2 sks
6. Hukum Persetujuan Khusus	: 2 sks
7. Hukum Perusahaan	: 2 sks
8. Hukum Penanaman Modal	: 2 sks
9. Hukum Jaminan	: 2 sks
10. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	: 2 sks
11. Hukum Acara Peradilan Agama	: 2 sks
12. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	: 2 sks
13. Sistem Politik di Indonesia	: 2 sks
14. Perbandingan Hukum Tata Negara	: 2 sks
15. Hukum Kelembagaan Negara	: 2 sks
16. Hukum Keuangan Negara	: 2 sks
17. Hukum Laut Internasional	: 2 sks
18. Hukum Perjanjian Internasional	: 2 sks
19. Hukum Diplomatik dan Konsuler	: 2 sks
20. Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional	: 2 sks
21. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	: 2 sks
22. Hukum Pemerintahan Daerah	: 2 sks
23. Hukum Tata Ruang dan Perizinan	: 2 sks
24. Hukum Kepegawaian	: 2 sks
25. Kapita Selekta Hukum Pidana	: 2 sks
26. Tindak Pidana di Bidang Perekonomian	: 2 sks
27. Hukum Pidana Internasional	: 2 sks
28. Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan	: 2 sks
29. Kapita Selekta Hukum Perdata	: 2 sks
30. Hukum Kewarganegaraan	: 2 sks
31. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	: 2 sks
32. Hukum Kontrak Internasional	: 2 sks
33. Hukum Organisasi Internasional	: 2 sks
34. Hukum Humaniter	: 2 sks
35. Hukum Udara dan Ruang Angkasa	: 2 sks
36. Perbuatan Melanggar Hukum	: <u>2 sks</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>: 72 sks</b>

**Total A+B+C+D+E+F ( 4+32+8+10+4+16 ) = 74 sks**  
**Kurikulum Inti + Institusional ( 76 + 74 ) = 150 sks**

Bagian Ketiga  
Kode, Nama Mata Kuliah dan Prasyarat

Pasal 4

Setiap mata kuliah diberi kode, nama mata kuliah, bobot sks dan prasyarat untuk mata kuliah tertentu

Pasal 5  
Mata Kuliah Inti sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini

No.	Kode MK	Kode Komp	Mata Kuliah	Kurikulum	sks	Prasyarat (Menempuh dan Lulus Mata Kuliah)	Gjl	Gnp
1.	UNI 101	003	Pendidikan Agama	Inti	2	-		√
2.	UNI 102	221	Pendidikan Kewarganegaraan	Inti	2	-	√	
3.	UNI103	171	Bahasa Indonesia	Inti	2	-	√	
4.	HUK11108	006	Pengantar Ilmu Hukum	Inti	4	-	√	
5.	HUK11208	108	Pengantar Hukum Indonesia	Inti	4	HUK11108		√
6.	HUK11308	214	Ilmu Negara	Inti	3	-	√	
7.	HUK21208	087	Metode Penelitian Hukum	Inti	2	HUK17008, HUK17108, HUK21308, HUK11508, HUK21408, HUK11608, HUK11708, HUK24108	√	
8.	HUK21308	154	Hukum Adat	Inti	2	HUK11108/ HUK11208	√	
9.	HUK11508	109	Hukum Pidana	Inti	4	HUK11108/ HUK11208		√
10.	HUK21408	151	Hukum Perdata	Inti	4	HUK11108/ HUK11208	√	
11.	HUK11608	024	Hukum Dagang	Inti	3	HUK11108/ HUK11208		√
12.	HUK11708	110	Hukum Tata Negara	Inti	4	HUK11108, HUK11208/ HUK11308		√
13.	HUK21508	105	Hukum Islam	Inti	2	HUK11108/ HUK11208	√	
14.	HUK21708	215	Hukum Agraria	Inti	2	HUK11108/ HUK11208	√	
15.	HUK21808	015	Hukum Administrasi Negara	Inti	4	HUK11108/ HUK11208/ HUK11308	√	
16.	HUK22208	216	Hukum Acara Pidana	Inti	3	HUK11508	√	
17.	HUK22308	217	Hukum Acara Perdata	Inti	3	HUK21408		√
18.	HUK22480	111	Hukum Acara Tata Usaha Negara	Inti	2	HUK21808		√
19.	HUK30208	170	Skripsi	Inti	4	HUK34008, HUK31308, HUK38008, HUK37008	√	√
20.	HUK34008	123	Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)	Inti	10	HUK11508, HUK11608, HUK21208, HUK21408, HUK21508, HUK21808, HUK21908, HUK22008, HUK22108, HUK22208, HUK22308, HUK22408, HUK22708, HUK24108, HUK37008	√	√
21.	HUK23208	039	Hukum Lingkungan	Inti	2	HUK21808		√
22.	HUK23108	028	Hukum Internasional	Inti	4	HUK11108, HUK11208, HUK11308, HUK11708	√	
23.	HUK38008	219	Filsafat Hukum	Inti	2	HUK21308, HUK11508, HUK17008, HUK17108, HUK21408, HUK11708, HUK21808, HUK24108	√	
24.	HUK37008	220	Etika dan Tanggung Jawab Profesi	Inti	2	HUK22208, HUK22308, HUK22480, HUK38008		√



Pasal 6

Mata Kuliah Instiusional sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

No.	Kode MK	Kode Komp	Mata Kuliah	Kurikulum	sks	Prasyarat (Menempuh dan Lulus Mata Kuliah)	Gjl	Gn p
1.	HUK11408	090	Bahasa Belanda	Institusional	2	-		√
2.	HUK17008	165	Sosiologi	Institusional	2	-	√	
3.	HUK14008	097	Ilmu Ekonomi	Institusional	2	-	√	
4.	HUK17108	100	Antropologi Budaya	Institusional	2	-	√	
5.	HUK11908	099	Bahasa Inggris	Institusional	2	-	√	
6.	HUK21608	222	Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat	Institusional	2	HUK21308		√
7.	HUK11808	168	Hukum Ketenagakerjaan	Institusional	2	HUK11108/ HUK11208		√
8.	HUK21908	114	Hukum Konstitusi	Institusional	2	HUK11708		√
9.	HUK22008	167	Hukum Perikatan	Institusional	2	HUK21408		√
10.	HUK22108	166	Hukum Pidana dalam Kodifikasi	Institusional	2	HUK11508	√	
11.	HUK22608	053	Hukum Surat Berharga	Institusional	2	HUK11608	√	
12.	HUK22708	040	Hukum Keluarga dalam Islam	Institusional	2	HUK21508		√
13.	HUK22808	056	Hukum Tanah	Institusional	2	HUK21708		√
14.	HUK31008	119	Hukum Perdata Internasional	Institusional	2	HUK11108, HUK11208, HUK11308, HUK21408	√	
15.	HUK22908	118	Hukum Pertambangan	Institusional	2	HUK21708		√
16.	HPA38308	061	Kriminologi	Institusional	2	HUK11508/ HUK22208	√	
17.	HUK14108	068	Ilmu Politik	Institusional	2	HUK11308		√
18.	HUK22508	038	Hukum Perkawinan	Institusional	2	HUK21408		√
19.	HUK23008	187	Hukum Pajak	Institusional	2	HUK21808		√
20.	HUK24108	223	Ilmu Perundang-Undangan	Institusional	2	HUK11108, HUK11308, HUK11708, HUK14108	√	
21.	HUK31108	218	Hukum dan Hak Asasi Manusia	Institusional	2	HUK11108, HUK11208, HUK11308, HUK11508, HUK11708, HUK14108		√
22.	HUK31208	094	KKN/KKL/Klinik Hukum	Institusional	4	HUK34008 <b>Minimal Nilai C</b>	√	√
23.	HUK31308	092	Sosiologi Hukum	Institusional	2	HUK17008, HUK17108, HUK21208, HUK21308, HUK11508, HUK21408, HUK11608, HUK11708	√	

Pasal 7

Prasyarat memilih Program Kekhususan

- (1). Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) Program Kekhususan Hukum Pidana prasyaratnya adalah sebagai berikut:

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1.	HUK11108	Pengantar Ilmu Hukum	4
2.	HUK11208	Pengantar Hukum Indonesia	4
3.	HUK11508	Hukum Pidana	4
4.	HUK22208	Hukum Acara Pidana	3
5.	HUK22108	Hukum Pidana Dalam Kodifikasi	3
6.	HPA38308	Kriminologi	2
<b>Jumlah</b>			<b>20</b>

(2). Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) Program Kekhususan Hukum Perdata prasyaratnya adalah sebagai berikut:

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1.	HUK11108	Pengantar Ilmu Hukum	4
2.	HUK11208	Pengantar Hukum Indonesia	4
3.	HUK11608	Hukum Dagang	3
4.	HUK21408	Hukum Perdata	4
5.	HUK22308	Hukum Acara Perdata	3
6.	HUK22008	Hukum Perikatan	2
<b>Jumlah</b>			<b>20</b>

(3). Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) Program Kekhususan Hukum Tata Negara prasyaratnya adalah sebagai berikut:

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1.	HUK11108	Pengantar Ilmu Hukum	4
2.	HUK11208	Pengantar Hukum Indonesia	4
3.	HUK11308	Ilmu Negara	3
4.	HUK11708	Hukum Tata Negara	4
5.	HUK21908	Hukum Konstitusi	2
6.	HUK14108	Ilmu Politik	2
<b>Jumlah</b>			<b>19</b>

(4). Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara prasyaratnya adalah sebagai berikut:

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1.	HUK11108	Pengantar Ilmu Hukum	4
2.	HUK11208	Pengantar Hukum Indonesia	4
3.	HUK11308	Ilmu Negara	3
4.	HUK21808	Hukum Administrasi Negara	4
5.	HUK22408	Hukum Acara Tata Usaha Negara	2
6.	HUK21908	Hukum Konstitusi	2
<b>Jumlah</b>			<b>19</b>

(5). Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) Program Kekhususan Hukum Internasional prasyaratnya adalah sebagai berikut:

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1.	HUK11108	Pengantar Ilmu Hukum	4
2.	HUK11208	Pengantar Hukum Indonesia	4
3.	HUK11308	Ilmu Negara	3
4.	HUK11708	Hukum Tata Negara	4
5.	HUK23108	Hukum Internasional	4
6.	HUK31008	Hukum Perdata Internasional	2
<b>Jumlah</b>			<b>21</b>

Pasal 8

Mata Kuliah Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) yang termasuk kelompok mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB), prasyaratnya telah menempuh dan lulus mata kuliah berikut:

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1.	HUK11508	Hukum Pidana	4
2.	HUK11608	Hukum Dagang	3
3.	HUK21208	Metode Penelitian Hukum	2
4.	HUK21408	Hukum Perdata	4
5.	HUK21508	Hukum Islam	2
6.	HUK21808	Hukum Administrasi Negara	4
7.	HUK21908	Hukum Konstitusi	2
8.	HUK22008	Hukum Perikatan	2
9.	HUK22108	Hukum Pidana Kodifikasi	2
10.	HUK22208	Hukum Acara Pidana	3
11.	HUK22308	Hukum Acara Perdata	4
12.	HUK22408	Hukum Acara Tata Usaha Negara	2
13.	HUK22708	Hukum Keluarga Dalam Islam	2
14.	HUK24108	Ilmu Perundang-undangan	2
15.	HUK37008	Etika dan Tanggung Jawab Profesi	2
<b>Jumlah</b>			<b>40</b>

Pasal 9

Mata Kuliah KKN/ KKL/ Klinik Hukum yang termasuk kelompok mata kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK), prasyaratnya telah menempuh Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) dengan **Nilai Minimal C**

Bagian Keempat  
Mata Kuliah Pilihan

Pasal 10

(1) Mata Kuliah PILIHAN ditetapkan dalam Pola Terbuka

(2) Mata Kuliah PILIHAN Wajib ditempuh 16 sks yang dapat dipilih di antara mata kuliah di bawah ini :

No.	Kode MK	Kode Komp	Mata Kuliah	sks	Gjl	Gnp
1.	HPA38108		Perbandingan Hukum Pidana	2	√	√
2.	HPA39608		Hukum Pidana di Luar KUHP	2	√	√
3.	HPA39708		Politik Hukum Pidana	2	√	√
4.	HPA38408		Hukum Pidana Anak	2	√	√
5.	HPA38908		Hukum Penintensier	2	√	√
6.	HPB38108		Hukum Persetujuan Khusus	2	√	√
7.	HPB38208		Hukum Perusahaan	2	√	√
8.	HPB38308		Hukum Penanaman Modal	2	√	√
9.	HPB38408		Hukum Jaminan	2	√	√
10.	HPB38508		Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	2	√	√
11.	HPC39008		Hukum Acara Peradilan Agama	2	√	√
12.	HPD34008		Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	√	√
13.	HPD38208		Sistem Politik di Indonesia	2	√	√
14.	HPD38308		Perbandingan Hukum Tata Negara	2	√	√
15.	HPD38408		Hukum Kelembagaan Negara	2	√	√
16.	HPD39308		Hukum Keuangan Negara	2	√	√
17.	HPE38108		Hukum Laut Internasional	2	√	√
18.	HPE38208		Hukum Perjanjian Internasional	2	√	√
19.	HPD39408		Hukum Diplomatik dan Konsuler	2	√	√
20.	HPE39608		Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional	2	√	√
21.	HPE38508		Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	2	√	√
22.	HPF38208		Hukum Pemerintahan Daerah	2	√	√
23.	HPF38408		Hukum Tata Ruang dan Perizinan	2	√	√
24.	HPF38108		Hukum Kepegawaian	2	√	√
25.	HPA38808		Kapita Selektta Hukum Pidana	2	√	√
26.	HPA39208		Tindak Pidana di Bidang Perekonomian	2	√	√
27.	HPA39508		Hukum Pidana Internasional	2	√	√
28.	HPB40208		Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan	2	√	√
29.	HPB39408		Kapita Selektta Hukum Perdata	2	√	√
30.	HPD38608		Hukum Kewarganegaraan	2	√	√
31.	HPD39608		Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	2	√	√
32.	HPE38808		Hukum Kontrak Internasional	2	√	√
33.	HPE38908		Hukum Organisasi Internasional	2	√	√
34.	HPE39108		Hukum Humaniter	2	√	√
35.	HPE39308		Hukum Udara dan Ruang Angkasa	2	√	√
36.	HPB39908		Perbuatan Melanggar Hukum	2	√	√
<b>Jumlah</b>				<b>72</b>		

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

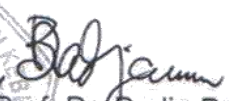
Pasal 11

- (1) Kurikulum ini berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2012 terhitung sejak tahun akademik 2012/2013
- (2) Bagi mahasiswa angkatan tahun 2008 sampai dengan angkatan tahun 2011 dapat mengikuti ketentuan kurikulum 2008 sebelum perubahan maupun setelah perubahan
- (3) Dua tahun setelah berlakunya keputusan ini, bagi mahasiswa angkatan tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 harus mengikuti ketentuan perubahan kurikulum 2008

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Kurikulum ini disebut perubahan kurikulum tahun 2008
- (2) Perubahan Kurikulum tahun 2008 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Rektor,  
  
Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A.  
NIP 195307071979032001

